

LAPORAN

2023

Lkjip

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(lkjip) Tahun 2023



DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, APT., M.Si.

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680814 199403 1 012



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan terjadinya disfungsi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah terjadinya disfungsi sosial, baik akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, korban tindak kekerasan maupun akibat korban bencana. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD yang menangani permasalahan tersebut diatas sangat berkomitmen untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial masyarakat yang hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang utuh.

Adapun kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 249.893 jiwa. Pencapaian penanganan PMKS dengan Program dan Kegiatan yang ada telah mampu menurunkan 1,78% PMKS.

Kondisi ini terlihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada posisi BB.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	10
E. Aspek Strategis Organisasi	11
F. Isu-isu Strategis	12
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ..	13
 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. Tujuan	14
2. Sasaran	15
3. Indikator Kinerja Sasaran	15
4. Target Tahunan	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	19



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja	23
C. Analisis Capaian Kinerja	23
D. Realisasi Anggaran	30

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur (SDA)	11
2.	Tabel 1.2 Sarana & Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim	13
3.	Tabel 2.1 Target Tahunan	17
4.	Tabel 2.2 Program dan Kegiatan	17
5.	Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama	19
6.	Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim	20
7.	Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	21
8.	Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2023 Per Triwulan	23
9.	Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	24
10.	Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	24
11.	Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim Tahun 2023	25
12.	Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Perubahan) 2019 -2023	25
13.	Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial	30
14.	Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja	30
15.	Tabel 3.9 Realisasi Anggaran APBD	31



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Grafik 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltim	2
2. Grafik 3.1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 –2023	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial.

2. Fungsi.

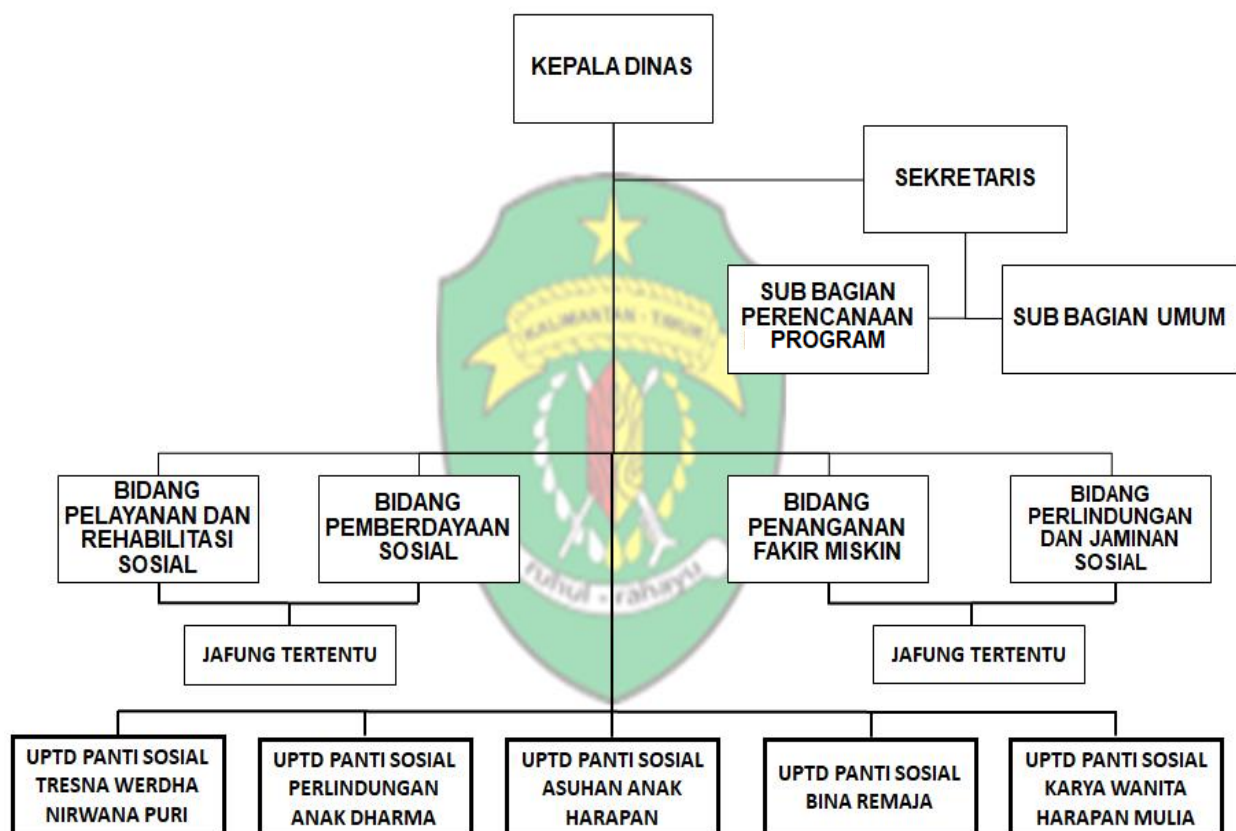
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Prov Kaltim mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang Ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;

- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional Tertentu Seperti yang digambarkan pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltim



Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat.;
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penyiapan Bahan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan Serta Pengaduan Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi Keuangan;
- f. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



- Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Pemberdayaan Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;



- e. Penyiapan Bahan-Bahan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- g. Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah UGB;
- h. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Kesejahteraan Anak;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- f. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.



4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pencegahan Dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.



5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanganan Fakir Miskin;
- c. Memverifikasi dan Memvalidasi Data Calon Penerima Bantuan Program Penanganan Fakir Miskin di Perkotaan, Pedesaan Serta Daerah Pesisir dan Pulau Terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 unit yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari

➤ UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri (PSTWNP)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Daya tampung 110 (seratus sepuluh) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:



- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan dengan susunan.

Fungsi Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.

Daya tampung 80 anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu:
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan dan Advokasi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial.

Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar.



Daya tampung 80 (Delapan Puluh) anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
 - Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Fungsi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar.

Daya tampung sebanyak 75 (enam puluh lima) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
 - Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (PSKW)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Fungsi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan



perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Daya tampung 35 (tiga puluh lima) orang dengan susunan. Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial;
- Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 161 orang dan Non ASN sebanyak 193 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut :



Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	IV	III	II	I	S2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris												
Kepala Bidang dan Kepala Panti	5	3	8				6	2				
Kepala Seksi	13	4		17			2	15				
Fungsional / Staff PNS	91	42	4	49	63	11	2	31	5	74	6	3
Non ASN	113	72					1	83	10	91	3	5
Jumlah PNS	104	49	13	66	63	11	11	48	11	74	6	3
Jumlah PNS + Non ASN	217	121	13	66	63	11	15	137	21	163	10	9
JUMLAH KESELURUAHAN	354		153				354					

E. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi.



F. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Isu Strategis).

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



1. Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data;
3. Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;
4. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Adapun sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.426	M2
2	Gedung	3	Unit (2 Lantai)
		1.335	m2
3	Listrik	4	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	2	Ruang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Hakikat Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya peningkatan kualitas Kesejahteraan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Komunitas Masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk berfikir, berpijak dan bertindak dalam penyusunan Visi, Misi dan Strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial daerah Kalimantan Timur.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata serta dapat dirasakan oleh seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan yang berkeadilan Sosial.

Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan Sosial warga negara terutama PMKS agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Sosialnya.

Untuk mencapai Terwujudnya Kesejahteraan bagi PMKS maka diperlukannya peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, peningkatan pemberdayaan PMKS, meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan.

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan), Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :



Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kalimantan Timur

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi Pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/Pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Indikator Kinerja Sasaran

Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai.



4. Target Tahunan

Dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Dinas Sosial Provinsi menetapkan target Tahunan dan dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2.1. Target Tahunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	6,60	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Adapun untuk melihat program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM DAN KEGIATAN APBD							
1	Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5%	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5%	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
					Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Makanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
						Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
							Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
							Pemulangan ke Daerah Asal



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
							Pelayanan Dukungan PsikoSosial
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Pencapaian indikator kinerja utama ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Pehitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Mengukur terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah Populasi PMKS}} \times 100 \%$	Laporan Instansi Sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid.	Dinas Sosial dengan melibatkan Instansi Terkait .

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh TAPD yang kemudian dilakukan penyesuaian target yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD 2019 – 2023, untuk tahun 2023 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana ikhtisar di bawah ini:



Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5 % pertahun	Persen	1.5



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem LkjIP Tahun 2022.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	
						Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,05	24,07	24,29	30%	25,50
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,82	18,75	19,06	20%	14,20
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97	10,97	10%	5,90
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,49	5,70	5,70	20%	11,00
5	Capaian Kinerja	20%	11,44	11,50	13,13	20%	14,80
	Nilai Hasil Evaluasi		68,77	70,99	73,15		71,40
	Kategori Penilaian		B	BB	BB		BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

2.1. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial Prov. Kaltim telah melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara berkala dan dilakukan per triwulan, adapun kegiatan adalah Pemantauan Rencana Aksi, Realisasi Kinerja dan Keuangan serta kendala yang dihadapi dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.



2.2. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial Prov. Kaltim telah menyusun Pengukuran Kinerja yang berupa Rancangan Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi yang dibuat secara berjenjang dari level Esselon II sampai dengan staff, per triwulan dilakukan Evaluasi atau pemantauan baik Realisasi Kinerja maupun keuangan serta Kendala yang di hadapi pada Rencana Aksi atau RKT.

2.3. Pelaporan Kinerja

Sebelum menjadi Laporan LkjIP Dinas Sosial Prov. Kaltim melakukan pengisian pada Matriks capaian kinerja per triwulan sehingga setelah triwulan ke IV maka akan di buat Laporan LkjIP, pada Laporan ini juga akan di masukan perbandingan realisasi kinerja di Level Provinsi. Laporan LkjIP juga akan menjadi acuan dan penyesuaian perencanaan Kinerja Untuk Tahun berikutnya.

2.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Sosial Prov. Kaltim pada Tahun 2023 melaksanakan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara berjenjang Pada Bidang-Bidang dan UPTD di Lingkungan Dinsos Prov. Kaltim.

2.5. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2023 Dinsos Prov. Kaltim telah menetapkan dan merasionalisasi target atas seluruh Kinerja sehingga target Kinerja dapat tercapai secara keseluruhan.



B. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan penetapan Rencana Kinerja Tahunan 2023, yang merupakan Implementasi Rencana Strategis 2019-2023, Sedangkan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2023
Per Triwulan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Persen	1.5	Triwulan I	0.375	0.192	51
					Triwulan II	0.375	0.374	99
					Triwulan III	0.375	0.636	169
					Triwulan IV	0.375	0.575	110
JUMLAH				1.5		1.5	1.777	118.5

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Persen	1.5	1.78	118.5

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim dengan beberapa tahun lalu dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					%Peningkatan / Penurunan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8+7+6+5+4) / 5*100%
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Persen	1.23	1.47	1.08	1,69	1.78	96.6%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan, adapun jumlah capaian keseluruhan sampai dengan tahun 2023 adalah 96.6%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja.

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Realisasi dan Capaian RPJMD (Perubahan) 2019-2023 dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan/ Kemunduran
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	Persen	1.5	1.78	0.28

Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Perubahan) 2019 -2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD Perubahan	Realisasi s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan/ Kemunduran
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.90	6.11	(0.21)

*Sumber data BPS Prov. kaltim

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Capaian kinerja pada tahun ini melebihi dengan target awal RPJMD yaitu 1.5% hal ini di sebabkan oleh adanya pemberian bantuan kepada korban bencana melebihi dari target awal yang di karenakan banyaknya bencana yang terjadi pada Tahun 2023.

Disamping itu fokus utama dana ABPD sesuai dengan SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan penanganan dan pelayanan Sosial pemerintah provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 5 UPTD yang berfungsi sebagai unit-unit pelayanan Sosial penanganan PMKS dalam panti diantaranya UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Nirwana Puri (110 orang), UPTD Panti Sosial Bina Remaja (75 orang) yang berfungsi melaksanakan pelayanan dan



bimbingan keterampilan bagi remaja dan putus sekolah, UPTD Panti Sosial Anak Harapan (80 anak) dan UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (80 anak) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu, anak terlantar anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan yang terakhir yaitu UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia (35 klien) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi wanita rawan Sosial ekonomi dan wanita korban *human trafficking*.

5. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan.

Untuk mencapai Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi 'core' penanganan bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2023 meliputi:

- a. Pemberian bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial sebesar 2.205 Orang. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 1.518 Orang dan terealisasi sebanyak 2205 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 145%;
- b. Pemberian bantuan Bagi Anak Terlantar sebesar 120 Orang. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 120 Orang dan terealisasi sebanyak 120 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%;
- c. Pemberian bantuan Lanjut Usia berupa tambahan Gizi sebesar 100 Orang. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 100 Orang dan terealisasi sebanyak 100 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%;
- d. Pemberian bantuan Bagi Penyandang Disabilitas sebesar 304 Orang. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 304 Orang dan terealisasi sebanyak 304 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%;
- e. Pemberian Sosialisasi Bagi Eks Narapidana, Napza sebesar 28 Orang. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 28 Orang dan terealisasi sebanyak 28 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100%;



- f. Pemberian bantuan terhadap PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat mandiri sejumlah 20 Kelompok Keluarga Usaha Bersama yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga per 1 KUBE di pagu anggaran murni dan 20 Kelompok di pagu anggaran perubahan, pada Tahun 2023 terealisasi sebanyak 40 KUBE (800 Orang) atau dengan tingkat capaian 100%;
- g. Pemberian bantuan UEP Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebesar 50 Orang target di pagu anggaran murni dan 405 orang di Anggaran Perubahan dan terealisasi sebanyak 455 orang dengan tingkat capaian kinerja yaitu 100% menunjukkan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya anggaran perubahan yang di peruntukan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 405 Orang.

Berdasarkan penanganan tersebut, disamping Program dan Kegiatan lain yang tidak berdampak langsung terhadap PMKS, maka dapat disimpulkan dengan mengacu pada formula dalam pengukuran capaian kinerja jumlah PMKS yang tertangani yaitu sebanyak 4.440 Orang dibagi dengan jumlah populasi PMKS Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 249.892 Jiwa. Adapun terdapat capaian kinerja tahun 2023 adalah **1.78%**

- **Permasalahan**

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah Kesejahteraan Sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan Sosial, kecacatan, keterasingan dan keterpencilan serta korban bencana yang secara operasional disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Program-Program Kesejahteraan Sosial antara lain meliputi :



1. Perpindahan Ibu Kota Negara menuju Kalimantan Timur akan berdampak yaitu akan menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain, kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan (unskill) yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan PMKS di Kab/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan Program dan distribusi Kegiatan untuk Kabupaten/Kota;
3. Terdapat *Blank Spot* di salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur menyebabkan keterlambatan dalam mengupdate data pada daerah yang bersangkutan;
4. Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
5. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya aparatur dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan Program-Program Kesejahteraan Sosial;
6. Kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang sering mengalami perubahan dari segi peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik di Pusat maupun di Daerah;
7. Rotasi dan mutasi baik ditingkat pejabat maupun ditingkat staf di kab/Kota berlangsung begitu cepat sehingga mempengaruhi profesionalisme penanganan PMKS;



- **Pemecahan Masalah**

Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja Dinas-Dinas / Instansi Sosial Kab/Kota se Kaltim;
2. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan Program-Program skala prioritas dan mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada PMKS serta mendorong peran aktif dunia usaha melalui CSR;
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur;
4. Penajaman Program-Program kesejahteraan Sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial seperti peningkatan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian Usaha Ekonomi Produktif;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Adapun analisis efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.5% pertahun	118.5	96.37	9,93

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah 9,93% yang didapatkan dari perbandingan kembali hasil output dan input hasil capaian kinerja dan penyerapan Anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Capain Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diterima baik yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi APBD	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1.5	1.78	118.5	Samarinda, Balipapan, Bontang, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Berau dan Mahulu.	Rp. 78,983,172,363	96.37



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi yaitu 118.5 dan tingkat capaian Keuangan sebesar 96.37%.

2. Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan

• Realisasi Anggaran APBD

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran APBD Januari sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp. 78,983,172,363 dari total anggaran sebesar Rp. 81,961,664,182 atau sebesar 96.37%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
1. DINAS			54,980,152,310	95,64	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	57,185,800,018		
	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	838,348,952		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	838,348,952	97,34	
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	31,732,517,476		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	27,635,207,727	94,79	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	4,097,309,749	97,21	
	c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	3,750,000		
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	3,750,000	32,51	
	d Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	2,411,152,350		



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	198,500,000	99,70	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	310,725,000	99,74	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	295,205,500	99,90	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	1,606,721,850	93,91	
	e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	6,216,352,282		
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	2,393,735,582	93,99	
	- Pengadaan Mebel	Samarinda	549,953,000	99,96	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	3,272,663,700	99,98	
1.	f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	501,359,433		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	29,788,000	49,23	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	471,571,433	96,60	
	g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1,696,086,453		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	62,612,944	89,25	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	13,702,909	45,22	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	800,922,200	99,90	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	818,848,400	90,84	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	SAMARINDA	1,254,323,249		
	a Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Samarinda	1,254,323,249		
	- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	1,254,323,249	87,93	
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	3,683,863,062		
	a Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	2,323,791,593		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	671,851,300	99,96	
	- Penyediaan Alat Bantu	10 Kab/Kota	151,883,550	99,68	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	919,489,046	98,82	
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	580,567,697	85,72	
3.	b Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	10 Kab/Kota	366,260,424		
	- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	10 Kab/Kota	366,260,424	99,42	
	c Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	481,244,190		
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab/Kota	481,244,190	98,09	
	d Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10 Kab/Kota	512,566,855		
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab/Kota	512,566,855	95,86	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 KAB/KOTA	4,544,044,609		
	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	4,544,044,609		
	- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	4,544,044,609	98,20	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 KAB/KOTA	1,406,316,772		
	a <i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	10 Kab/Kota	1,406,316,772		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	587,980,818	99,36	
	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10 Kab/Kota	161,130,146	79,75	
	- Pelayanan Dukungan PsikoSosial	10 Kab/Kota	657,205,808	99,05	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	SAMARINDA	692,037,672		
	a <i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	Samarinda	692,037,672		
	- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	692,037,672	96,74	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
2. UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PUTRI (PSTW-NP)			6,816,364,385	99.36	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	3,444,359,378		
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	2,048,726,000		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	2,048,726,000	99,56	
	b Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	53,930,000		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	53,930,000	98,90	
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	786,838,030		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	15,028,800	99,79	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	458,654,200	99,92	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	28,332,950	96,23	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	284,822,080	99,93	
	d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	276,168,158		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	268,488,158	96,11	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	7,680,000	99	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1.	<i>e</i> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	278,697,190		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	98,329,590	88,26	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	155,534,800	99,59	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	24,832,800	100	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	3,372,005,007		
	<i>a</i> Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	3,372,005,007		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	2,341,316,709	98,82	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	44,313,000	99,97	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10 Kab/Kota	84,471,648	99,08	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab/Kota	145,453,700	98,44	
	- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	10 Kab/Kota	682,991,950	99,88	
	- Pemulasaraan	10 Kab/Kota	73,458,000	99,94	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
	3. UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)		4,789,643,634	99.13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	2,423,393,085		
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1,329,590,260		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1,329,590,260	99,53	
	b Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	442,987,708		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	9,801,500	98,01	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	141,782,500	99,71	
1.	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	14,639,500	99,68	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	276,764,208	99,62	
	c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	222,957,484		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	2,000,000	96,11	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	220,957,484	74,32	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1.	d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	427,857,633		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	167,920,633	99,59	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	61,982,000	99,72	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	197,955,000	99,07	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	2,366,250,549		
	a Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	2,366,250,549		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	1,620,556,349	99,99	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	541,314,700	86,41	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10 Kab/Kota	108,379,500.	99,90	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	66,900,000	86,77	
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	29,100,000	99,21	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
	4. UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)		5,903,869,225	98,16	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	3,503,471,481		
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1,730,245,440		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1,730,245,440	99,97	
	b Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	468,776,900		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	468,776,900	99,95	
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	754,251,756		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	37,471,500	99,66	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	420,804,650	99,91	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	21,809,000	100	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	274,166,606	99,98	
	d Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	6,647,780		
	- Pengadaan Mebel	Samarinda	6,647,780	99,99	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1.	<i>e</i> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	217,516,685		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	5,161,000	92,89	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	132,825,685	70,78	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	79,530,000	94,86	
	<i>f</i> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	326,032,920		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	76,485,469	88,63	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	52,547,451	99,78	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	197,000,000	99,49	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	2,400,397,744		
	<i>a</i> Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	2,400,397,744		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	1,644,905,320	98,15	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	364,335,221	89,87	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10 Kab/Kota	173,863,125	95,89	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	85,355,800	100	
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	131,938,278	99,95	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
5. UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)			4,594,147,609	98,37	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	2,828,464,879		
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1,310,654,514		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1,310,654,514	96,94	
	b Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	84,901,600		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	84,901,600	99,99	
	c Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	737,413,720		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	59,327,500	99,76	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	298,961,657	98,77	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	23,969,400	99,51	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	355,155,163	99,83	
	d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	143,179,252		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	9,574,400	95,57	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	133,604,852	92,64	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1.	<i>e</i> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	552,315,793		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	71,731,530	87,04	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	67,990,963	99,93	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	412,593,300	99,84	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	1,765,682,730		
	<i>a</i> Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	10 Kab/Kota	1,765,682,730		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	649,547,330	99,35	
	- Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	251,736,200	99,83	
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10 Kab/Kota	23,089,000	99,99	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	699,908,400	99,74	
	- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Kab/Kota	141,401,800	99,15	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7
	6. UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA (PSKW-HM)		1,898,995,200	97,23	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPERKANTORAN	SAMARINDA	1,320,688,900		
	a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	719,614,032		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	719,614,032	99,74	
	b Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	254,423,589		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	4,686,200	100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	50,864,075	99,99	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	2,836,400	100	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	196,036,914	99,91	
	c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	132,658,915		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	132,658,915	73,99	
	d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	213,992,364		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	26,004,364	90,13	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	38,588,000	100	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	149,400,000	99,60	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Ket
		lokasi	Realisasi	%	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 KAB/KOTA	1,765,682,730		
	<i>a</i> <i>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</i>	<i>10 Kab/Kota</i>	<i>1,765,682,730</i>		
	- Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	284,858,500	99,84	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	255,887,800	99,97	
	- Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Kab/Kota	5,340,000	100	
	- Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab/Kota	32,220,000	96,03	
JUMLAH KESELURUHAN DINAS DAN UPTD			78,983,172,363	96,37	

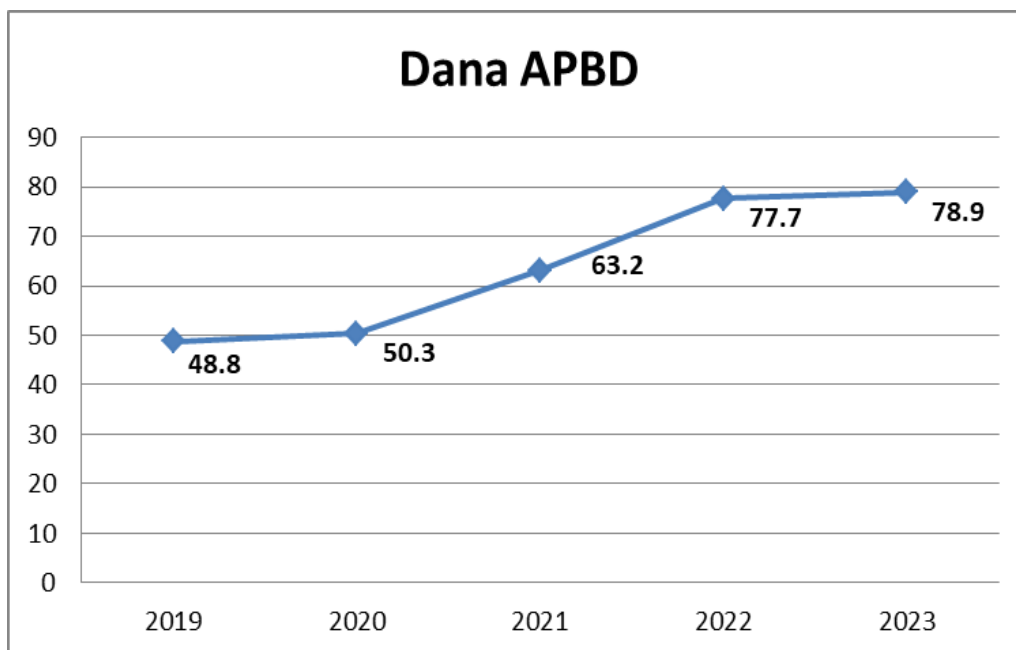
Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan capaian Anggaran APBD Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 78,983,172,363 (96,37%)



- Perkembangan jumlah anggaran

Capaian kinerja Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh besaran jumlah Anggaran yang diterima setiap Tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah anggaran Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023.





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan Permasalahan Sosial tidak dapat diselesaikan tanpa adanya proses Perencanaan yang tidak terpadu untuk menghasilkan Program dan Kegiatan guna pencapaian tujuan Penanganan PMKS. Kegiatan secara integral baik Program dan Kegiatan yang bersumber baik melalui APBD untuk mencapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian penutup dari LkjIP Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 telah tercapai, hal ini ditandai dengan beberapa sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan angka pencapaian yang sangat signifikan.

Demikian pula dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 juga menunjukan tingkat keberhasilan disebabkan oleh tercapainya seluruh Kegiatan yang bersifat Operasional. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran, berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi Sumber Daya Manusia / Aparatur maupun Dana Anggaran yang ada untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP) ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan



akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami Pimpinan beserta segenap aparatur dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar LkjIP Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ini dibuat sebagai bentuk transparasi dan pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Kepala,



Drs. Andi Muhammad Ishak, APT., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680814 199403 1 012